



Judul : TNI Jalankan OMSP, perlunya sinergi dengan Linmas
Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

TNI Jalankan OMSP Perlunya Sinergi Dengan Linmas

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh menilai, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Karena itu, perlu sinergi dengan satuan perlindungan masyarakat (linmas) di tingkat desa agar pelaksanaan OMSP dapat berjalan optimal.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membantu TNI dalam menjalankan tanggung jawab besar terhadap negara. Sebab, pada dasarnya linmas memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi wilayah masyarakat, mulai dari aspek geografis hingga kedaerahan.

"Saya secara pribadi merekomendasikan optimalisasi kolaborasi dengan linmas yang ada di desa-desa di seluruh Tanah Air," ujar Oleh dalam keterangannya. Kamis (9/10/2025).

Linmas, sambung legislator PKB itu, terbiasa terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat. Mereka juga sigap ketika terjadi masalah di daerahnya. Misalnya, saat terjadi bencana atau kerusuhan, linmas selalu hadir di garis depan. Karena itu, optimalisasi kolaborasi dengan linmas menjadi langkah terbaik untuk memaksimalkan fungsi pertahanan maupun pelaksanaan OMSP.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI dijelaskan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ada 16 kategori OMSP TNI dalam undang-undang

tersebut, di antaranya membantu penanggulangan bencana alam serta membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Selain itu, TNI juga turut membantu tugas Pemerintah Daerah serta mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis," terang legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu.

Dia berharap, peran TNI dapat terus dimaksimalkan, utamanya untuk menyokong berbagai program strategis nasional yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Salah satu program strategis tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, TNI dapat dibarkan dalam menyukseskan program tersebut. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama TNI, berbagai persoalan yang muncul terkait program itu bisa diminimalisir.

"Ini sangat baik. Untuk mendeteksi masalah yang dapat menyebabkan keracunan, diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI," tegasnya.

Terkait pelaksanaan program MBG, Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan memahami bahwa hal itu tidak berkaitan langsung dengan tugas utama TNI. Namun, TNI akan siap memberikan dukungan maksimal demi kepentingan negara.

Menurutnya, hal tersebut akan memberikan kesan positif bahwa TNI turut memantau jalannya program ini. ■ PYB